

**ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN  
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PDRB  
DI KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2005-2008**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**AHMAD DORANI**  
**NIM. C2B006008**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Ahmad Dorani

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006008

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN  
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PDRB  
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA  
TENGAH TAHUN 2005-2008**

Dosen Pembimbing : Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP.

Semarang, 6 April 2011

Dosen Pembimbing,

(Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP.)  
NIP. 196104161987101001

**PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Ahmad Dorani

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006008

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN  
DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PDRB DI  
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2005-2008**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 April 2011**

Tim penguji :

1. Drs.RMulyoHendarto,MSp. (.....)
2. Drs.YBagioMudakir,MSp. (.....)
3. BanatulHayati,SE.MSi (.....)

### **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ahmad Dorani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008 adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang, 6 April 2011

Yang Membuat Pernyataan,

Ahmad Dorani

NIM. C2B006008

### **ABSTRACT**

*Fiscal decentralization's role of pushing the economic growth has to become a concern of many countries, also in Indonesia. Since 2001, effectively Indonesian government has run the decentralization fiscal as a strategy to accelerate the local development. This policy has brought a big changes in region-expenditure-development of regencies / cities in central java province. During the implementation of fiscal decentralization in 2005-2008, the economic growth of regencies / cities in central java province has fluctuated.*

*This research aims to know the correlation between the impact of fiscal decentralization and the economic growth of regencies / cities in central java province in 2005-2008. This analysis is concern to the components of fiscal decentralization, there are PAD, DAU, and DBH. This research use panel data and the estimation method is Least Square Dummy Variable (LSDV) or also known as Fixed Effect Model (FEM).*

*The estimation result shows the implementation of fiscal decentralization can increase the local expenditure of regencies / cities in central java province, which is it obtained from PAD, DAU, and DBH, then it can be a base of economic development to increase the economic growth. PAD, DAU, and DBH have positive and significant effect to the economic growth of regencies / cities in central java province during 2005-2008.*

*Keywords : Economic Growth, PAD, DAU, DBH, Least Square Dummy Variable (LSDV).*

## ABSTRAKSI

Peran Desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian banyak Negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 2001, secara efektif pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal yang luas sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga telah membawa perubahan besar dalam perkembangan penerimaan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dari data yang diperoleh, selama pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2005-2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan meningkat justru mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008.

Analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 difokuskan pada komponen-komponen desentralisasi fiskal yaitu PAD, DAU dan DBH sebagai variabel-variabel independen dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data panel (data *time series* selama 4 tahun yaitu tahun 2005-2008 dan data *cross-section* sebanyak 35 yaitu 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah) dan alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode *Least Square Dummy Variable* (LSDV) atau dikenal juga sebagai *Fixed Effect Model* (FEM).

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, penerimaan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari PAD, DAU dan DBH cenderung meningkat yang selanjutnya dijadikan sebagai modal dalam pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 meningkat. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008.

Kata Kunci : Pertumbuhan PDRB, PAD, DAU, DBH, *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata atau S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008” tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Dr. HM. Chabachib, M.Si., Akt selaku mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Drs. H. Edy Yusuf A.G., M.Sc., Ph.D, selaku Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP, selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis dan memberikan motivasi kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah membukakan cakrawala ilmiah kepada penulis.
7. Kedua Orang tua saya (ayah dan ibu), Abang, Kakak, serta Adik atas segala doa, dukungan moral, kepercayaan, kasih sayang dan informasi serta fasilitas yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Mas Anang selaku pengelola perpustakaan BPS Jateng yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Junita Sari Syahrini atas segala bentuk dukungan yang tulus kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman IESP 2006 ( Bungaran, Dody, Gatha, Rendy, dll) yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah banyak membantu dengan memberikan masukan-masukan yang berarti dalam penulisan skripsi ini.
11. Serta semua sahabat, teman, serta pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi terutama bagi penelitian yang sejenis.

Semarang, 6 April 2011

Ahmad Dorani

NIM. C2B006008



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	19
1.3 Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	20
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	20
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	21
1.4 Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	23
2.1.1 Landasan Teori.....	23
2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	23
2.1.1.2 Model Pembangunan Ekonomi.....	25
2.1.1.3 Desentralisasi Fiskal.....	27
2.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	32
2.1.1.5 Dana Alokasi Umum .....	33
2.1.1.6 Dana Bagi Hasil .....	35
2.1.1.7 Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi .....	35
2.1.2 Penelitian Terdahulu .....	36
2.2 Kerangka Pemikiran.....	41
2.3 Hipotesis .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi operasional.....	44
3.1.1 Variabel Penelitian .....	44

3.1.2	Definisi Operasional.....	44
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	46
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	48
3.4	Metode Analisis.....	48
3.4.1	Spesifikasi Model.....	50
3.4.2	Pengujian Model.....	51
3.5	Uji Asumsi Klasik.....	55
3.5.1	Uji Multikolinearitas.....	55
3.5.2	Uji Autokolerasi.....	56
3.5.3	Uji Heteroskedastisitas.....	57
3.5.4	Uji Normalitas.....	57
3.6	Uji Statistik.....	58
3.6.1	Koefisien Determinasi.....	58
3.6.2	Uji Statistik t.....	59
3.6.3	Uji Statistik F.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	62
4.1.1	Provinsi Jawa Tengah.....	62
4.1.2	PDRB Objek Penelitian.....	63
4.1.3	PAD Objek Penelitian.....	67
4.1.4	DAU Objek Penelitian.....	71
4.1.5	DBH Objek Penelitian.....	74
4.2	Analisis Data.....	77
4.2.1	Pengujian Model.....	77
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	79
4.2.2.1	Uji Multikolinearitas.....	79
4.2.2.2	Uji Autokolerasi.....	80
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	81
4.2.2.4	Uji Normalitas.....	82
4.2.3	Uji Statistik Analisis Regresi.....	83
4.2.3.1	Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ).....	83
4.2.3.2	Uji <i>Best of Fit Model</i> .....	84
4.2.3.2.1	Uji Signifikansi Individual.....	84
4.2.3.2.2	Uji Signifikansi Simultan.....	86
4.2.4	Estimasi <i>fixed effect model</i> (FEM).....	86
4.3	Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	89
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	

5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	96
5.3 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	103

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4.1 Tiga Puluh Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	63
Tabel 4.2 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008.....	64
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008.....	69
Tabel 4.4 Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008 .....	72
Tabel 4.5 Realisasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008.....	75
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman .....	78
Tabel 4.7 Hasil Auxiliary Regression.....	79
Tabel 4.8 Hasil Uji Breusch-Godfrey Serrial Correlation LM test.....	80
Tabel 4.9 Hasil Uji White.....	81
Tabel 4.10 Hasil Regresi Utama.....	83
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t.....	85
Tabel 4.12 Dummy Effect.....	87
Tabel 4.13 Persamaan Regresi Tiap Kabupaten/Kota.....	88

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1 Normalitas Data.....	82

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran A Data Untuk Diolah .....	103
Lampiran B Uji Hausman .....	107
Lampiran C Hasil Regresi Utama.....	108
Lampiran D Hasil Regresi dengan <i>Common Effect</i> .....	109
Lampiran E Uji Multikolinearitas.....	110
Lampiran F Uji Normalitas.....	111
Lampiran G Uji Autokolerasi.....	113
Lampiran H Uji Heteroskedastisitas.....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen dan terdiri dari berbagai daerah yang mana masing-masing daerah memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dalam perkembangan bangsa Indonesia pada masa orde baru berbagai kebijakan seperti sentralisasi diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan sentralisasi yang dilakukan pemerintah pada masa orde baru kenyataannya hanya mampu mensejahterakan beberapa daerah atau beberapa golongan saja, serta menyebabkan ketimpangan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kebijakan sentralisasi yang bersifat *top down*, semua perencanaan dan keputusan ada pada pemerintahan pusat, sehingga penerapan kebijakan sentralisasi akan sulit diterapkan di Indonesia dengan kawasan yang luas, terpisah oleh kepulauan serta berbeda kepentingan, dan yang pasti kondisi disetiap daerah berbeda. Sebagian daerah akan terabaikan dan selanjutnya akan tertinggal. Gerakan reformasi sejak tahun 1997 memunculkan tuntutan untuk mengoreksi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satunya berupa perubahan kebijakan sentralisasi ke desentralisasi (Hamid, 2005).

Penerapan otonomi daerah/desentralisasi yang luas diharapkan mampu mengatasi permasalahan pada masa orde baru. Pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang

dari pusat kepada daerah. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*), Desentralisasi Administrasi (*Administrative Decentralization*), Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*), dan Desentralisasi Ekonomi (*Economic or Market Decentralization*) (Sidik, 2002).

Beberapa alasan mengapa desentralisasi perlu diterapkan menurut Joseph Riwo Kaho (1991) yang dikutip Yudoyono (2003) dan didukung dengan pendapat Cheema dan Rondinelli yang dikutip Romli (2007), yaitu :

1. Desentralisasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Desentralisasi sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri untuk mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Desentralisasi untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
4. Desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah (seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya) serta,
5. Desentralisasi juga untuk membantu pembangunan.



Beberapa keuntungan atau manfaat dari kebijakan desentralisasi menurut Rondinelli, Roy Bahl, Cheme dan Sabir yang dikutip oleh Yudoyono (2003) yaitu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah, memungkinkan melakukan inovasi, serta meningkatkan motivasi moral, komitmen dan produktivitas. Bagi negara-negara berkembang, jalan desentralisasi ditempuh untuk melepaskan diri dari perangkap pengelolaan pemerintahan yang tidak efektif dan tidak efisien, ketidakstabilan ekonomi makro, dan tidak memadainya pertumbuhan ekonomi (Hamid, 2005).

Kebijakan desentralisasi oleh pemerintah pusat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pengelolaan rumah tangganya (Adi dan Harianto, 2007). Dengan adanya kebijakan desentralisasi, daerah mendapat kesempatan untuk mengelola rumah tangganya sendiri untuk mencapai kemandirian daerah. Dengan wewenang yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan akan mampu mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada di setiap daerah karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kondisi serta apa yang dibutuhkan daerah. Berdasarkan pandangan ini, pemerintah daerah dipercaya bisa mengalokasikan dana kepada masing-masing sektor dalam ekonomi secara lebih efektif dan efisien daripada pemerintah pusat (Sumarsono dan Utomo, 2009). Selanjutnya dapat memacu aktivitas perekonomian di daerah.

Dari alasan dan manfaat pelaksanaan desentralisasi seperti yang dikemukakan para ahli di atas. Pemerintah bukan hanya mengembangkan potensi ekonomi yang ada serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah. Tetapi pemerintah daerah juga diharapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun perekonomian daerah yang selanjutnya akan meningkatkan aktivitas perekonomian nasional dan keadilan

ekonomi tiap daerah terpenuhi seperti yang dikemukakan Nelson Kafsir yang dikutip Romli (2007) dan di dukung oleh Bird dan Vaillancourt (2000).

Desentralisasi juga berarti pelepasan tanggung jawab yang berada di lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah (Bird dan Vaillancourt, 2000). Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang lebih untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut inisiatif sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Hal ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan finansial daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Terlebih lagi, pelaksanaan desentralisasi menuntut pertumbuhan ekonomi. Daerah diupayakan untuk menggali sumber daya yang ada di daerah untuk dapat melaksanakan desentralisasi.

Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan desentralisasi, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Bappenas, 2003). Dari pelaksanaan desentralisasi selama ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan pada umumnya adalah ketidakcukupan sumber daya keuangan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mempunyai finansial yang cukup dan lebih leluasa dalam mengelola keuangannya. Dalam pemberian wewenang itu sendiri harus meliputi kewenangan dalam mengelola keuangan (desentralisasi fiskal). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003 dalam Adi, 2006).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi (Sidik, 2002). Desentralisasi fiskal secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No. 33 tahun 2004. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Bohte dan Meier (2000) yang dikutip oleh Adi (2005) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi pada pemerintahan yang terdesentralisasi.

Keputusan menerapkan Desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Berdasarkan teori *Tiebout Model* yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan, sekaligus dari sisi penganggaran publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan berdaya guna (Sumarsono dan Utomo, 2009).

Pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial yang merespon perbedaan-perbedaan regional dan lokal mungkin akan lebih efektif dalam mempertinggi pembangunan ekonomi daripada kebijakan-kebijakan sentralisasi yang bisa jadi mengabaikan perbedaan-perbedaan antar daerah tersebut. Hal ini dapat dibenarkan sebab

pemerintah Kabupaten/Kota mengetahui daerahnya lebih baik daripada yang diketahui oleh pemerintah pusat (Sumarsono dan Utomo, 2009).

Seperti yang dikemukakan diatas, pengalokasian lebih diutamakan kepada belanja pembangunan seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Pelayanan publik yang lebih bagus akan mampu menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan infrastruktur dan pelayanan publik yang baik maka efisiensi, efektifitas dan produktifitas ekonomi akan tercapai sehingga investor juga akan mengalir ke daerah sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat yang bisa dilihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi daerah.

Menurut aliran Neo Klasik tingkat pertumbuhan ekonomi terdiri dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Modal dan jasa akan berpindah apabila balas jasanya berbeda-beda. Modal akan bergerak dari daerah yang mempunyai tingkat biaya tinggi ke daerah yang mempunyai tingkat biaya rendah, hal ini untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan akan pindah ke daerah lain yang mempunyai lapangan kerja baru yang merupakan pendorong untuk pembangunan di daerah itu. Harrod-Domar menekankan pentingnya peranan akumulasi modal dalam proses pertumbuhan ekonomi (Adisasmita, 2005).

Beberapa penelitian untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi sudah pernah dilakukan sebelumnya, hasilnya menunjukkan hubungan yang positif, namun ada juga yang negatif. Dalam penelitian yang dilakukan Amin Pujiati (2008) di Karasidenan Semarang antara tahun 2002-2006 menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Joko

Waluyo (2007) melakukan penelitian antardaerah di Indonesia tahun 2000-2005 yang menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam. Hadi Sasana (2005) melakukan penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta yang menyimpulkan bahwa PAD, DBH, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian Zhang dan Zhou(1998) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya di ukur dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2005-2008 di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008 (Persen)

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
Kab. Cilacap	7,72	5,11	2,64	6,07
Kab. Banyumas	3,21	4,48	5,30	5,41
Kab. Banjarnegara	3,95	4,35	5,01	4,98
Kab. Purbalingga	4,18	5,06	6,19	5,30
Kab. Kebumen	3,20	4,08	4,52	5,61
Kab. Purworejo	4,85	5,23	6,08	5,62
Kab. Wonosobo	3,19	3,23	3,58	3,69
Kab. Magelang	4,62	4,91	5,21	4,99
Kab. Boyolali	4,08	4,19	4,08	4,04
Kab. Klaten	4,59	2,30	3,31	3,93
Kab. Sukoharjo	4,11	4,53	5,11	4,84
Kab. Wonogiri	4,31	4,07	5,07	4,27
Kab. Karanganyar	5,49	5,08	5,74	5,75
Kab. Sragen	5,16	5,18	5,73	5,69
Kab. Grobogan	4,74	4,00	4,37	5,33
Kab. Blora	4,32	4,15	3,77	5,80
Kab. Rembang	3,56	5,53	3,81	4,67
Kab. Pati	3,94	4,45	5,19	4,94
Kab. Kudus	4,43	2,46	3,23	3,71
Kab. Jepara	4,23	4,19	4,74	4,49
Kab. Demak	3,86	4,02	4,15	4,11
Kab. Semarang	3,11	3,81	4,72	4,26
Kab. Temanggung	3,99	3,31	4,03	3,54
Kab. Kendal	2,63	3,67	4,28	3,92
Kab. Batang	2,80	2,51	3,49	3,67
Kab. Pekalongan	3,98	4,21	4,59	4,78
Kab. Pemasang	4,05	3,72	4,47	4,99
Kab. Tegal	4,72	5,19	5,51	5,32
Kab. Brebes	4,80	4,71	4,79	4,81
Kota. Magelang	4,33	2,44	5,17	5,05
Kota. Surakarta	5,15	5,43	5,82	5,69
Kota. Salatiga	4,15	4,17	5,39	4,98
Kota. Semarang	5,14	5,71	5,98	5,59
Kota. Pekalongan	3,82	3,06	3,80	3,73
Kota. Tegal	4,87	5,15	5,21	5,15

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka (berbagai tahun)

Dari tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan PDRB di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2005-2008 yaitu Cilacap, Boyolali, Karanganyar, Rembang, Demak, Batang, Brebes, Kota Semarang, Purworejo, Klaten, Sragen, Pati, Kabupaten Semarang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Banjarnegara, Sukoharjo, Grobogan, Kudus, Temanggung, Pemalang, Surakarta, Kota Tegal, Purbalingga, Magelang, Wonogiri, Blora, Jepara, Kendal, Tegal, Kota Salatiga, hal ini bukan sesuatu yang diharapkan dari keputusan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini juga bertentangan dengan beberapa pendapat penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Penelitian Amin Pujiati (2008), Joko Waluyo (2007), Hadi Sasana (2005) yang berpendapat bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap PDRB.

Dari data yang diperoleh menunjukkan Pertumbuhan PDRB daerah mengalami peningkatan tetapi tidak konsisten seperti yang dialami Kabupaten Seragen misalnya, pertumbuhan PDRB tahun 2005-2007 mengalami peningkatan yaitu dari 5,16% tahun 2005 menjadi 5,18% pada tahun 2006 dan menjadi 5,73% pada tahun 2007, mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 5,69%. Namun ada juga daerah yang mengalami pertumbuhan PDRB yang konsisten meskipun hanya beberapa Kabupaten saja yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Pekalongan. Pertumbuhan PDRB tertinggi pada Kabupaten Cilacap tahun 2005 yaitu 7,72%, namun daerah ini tidak mengalami peningkatan pertumbuhan PDRB setelah itu.

Penelitian yang dilakukan Zhang dan Zhou (1998) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk hal ini dari data

menunjukkan yang dialami Kabupaten Blora. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora dari tahun 2005-2007 mengalami penurunan dari 4,32% tahun 2005 menjadi 4,15% pada tahun 2006 dan menjadi 3,77% pada tahun 2007. Namun hal ini tidak berlanjut sampai tahun 2008 yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang drastis menjadi 5,80%. Pertumbuhan ekonomi paling rendah di alami oleh Kabupaten Klaten tahun 2006 yaitu 2,30%. Untuk memastikan apakah desentralisasi fiskal berpengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan ekonomi perlu penelitian yang lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Ada banyak variabel yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah kebijakan desentralisasi fiskal. Untuk lebih mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi juga ada banyak variabel yang bisa menjelaskannya. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan komponen-komponen desentralisasi fiskal.

Menurut Menteri Keuangan No. 224 / PMK.07 tahun 2008 komponen-komponen desentralisasi fiskal terdiri dari : pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Komponen-komponen tersebut juga merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi.

Beberapa faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain adalah komponen-komponen desentralisasi fiskal itu sendiri dan juga merupakan variabel yang digunakan Amin Pujiati (2008), Hadi Sasana (2005), Joko Waluyo (2007) dalam penelitiannya, yaitu : pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH).



Komponen desentralisasi fiskal yang pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Widjaja, 1992).

Keberhasilan desentralisasi fiskal jelas mensyaratkan keberhasilan daerah dalam mengelola potensi keuangan daerahnya. Hal ini menunjukkan PAD sebagai parameter utama keberhasilan tersebut (Juwaini, 2007). PAD bisa dijadikan indikator keberhasilan desentralisasi fiskal karena PAD merupakan penerimaan daerah yang asli berasal dari daerah itu sendiri, dan PAD menunjukkan adanya kemandirian dari daerah.

Menurut Nurcholis (2005), PAD merupakan sumber keuangan daerah yang utama. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar mandiri (Waluyo, 2007). Seperti yang dikemukakan Adi dan Harianto (2007) bahwa dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD.

Tabel 1.2  
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2008 (persen)

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
Kab. Cilacap	17,21	18,71	4,12	25,12
Kab. Banyumas	30,15	32,15	14,49	11,18
Kab. Purbalingga	15,23	17,03	10,59	20,95
Kab. Banjarnegara	25,06	28,75	2,25	3,67
Kab. Kebumen	14,21	91,81	-36,75	0,13
Kab. Purworejo	17,64	19,34	24,59	7,46
Kab. Wonosobo	21,43	31,21	19,56	4,24
Kab. Magelang	16,34	18,52	12,43	11,66
Kab. Boyolali	31,01	86,70	13,75	-5,53
Kab. Klaten	25,61	32,30	12,34	16,99
Kab. Sukoharjo	19,28	44,84	-3,54	-1,30
Kab. Wonogiri	20,10	25,02	11,05	7,55
Kab. Karanganyar	25,31	54,27	23,53	13,33
Kab. Sragen	18,36	20,70	25,26	-17,11
Kab. Grobogan	10,31	9,33	23,03	28,45
Kab. Blora	21,66	47,52	13,60	17,62
Kab. Rembang	17,02	40,18	5,63	21,01
Kab. Pati	9,78	15,83	19,29	-27,18
Kab. Kudus	14,52	28,22	7,68	2,28
Kab. Jepara	13,45	6,60	0,00	30,15
Kab. Demak	9,36	69,62	2,92	25,58
Kab. Semarang	10,42	17,90	6,36	17,05
Kab. Temanggung	21,05	29,98	11,85	8,28
Kab. Kendal	12,56	65,09	19,60	-5,36
Kab. Batang	4,71	7,96	23,10	-3,16
Kab. Pekalongan	3,62	5,93	37,46	18,41
Kab. Pemasang	9,45	59,25	-6,09	19,54
Kab. Tegal	10,14	12,16	17,66	9,79
Kab. Brebes	13,31	31,85	36,16	10,02
Kota. Magelang	12,89	-10,14	39,14	13,22
Kota. Surakarta	21,02	25,62	11,95	16,99
Kota. Salatiga	20,46	16,96	11,37	-5,23
Kota. Semarang	20,57	18,47	5,97	12,46
Kota. Pekalongan	14,12	15,67	16,45	16,94
Kota. Tegal	9,59	24,79	-2,30	11,74

Sumber : lampiran, data diolah

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD yang diperoleh pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menggali potensi ekonomi yang dimiliki daerah.

Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan PDRB di daerah tersebut. Brata (2004) yang dikutip oleh Adi dan Harianto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan PDRB daerah yaitu PAD serta bagian sumbangan dan bantuan. Dari data yang ada menunjukkan hal tersebut, dimana pada tahun 2005-2008 realisasi penerimaan PAD Kabupaten Pekalongan terus meningkat seperti yang ditunjukkan tabel 1.2, begitu juga dengan pertumbuhan PDRBnya yang ditunjukkan tabel 1.1 mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai tahun 2008.

Semakin tinggi PAD yang diperoleh daerah maka semakin tinggi pertumbuhan PDRB daerah, namun apabila eksploitasi PAD dilakukan secara berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Penerimaan PAD pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 mengalami peningkatan, namun peningkatan pertumbuhan PDRB seperti yang diharapkan dari keputusan penerapan desentralisasi fiskal belum terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari data pertumbuhan PDRB tabel 1.1 yang menunjukkan pertumbuhan PDRB beberapa daerah masih mengalami fluktuasi ini bisa disebabkan eksploitasi PAD yang berlebihan.

Komponen desentralisasi fiskal yang kedua yaitu Dana Alokasi Umum. Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. DAU merupakan salah satu transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat (Hamid, 2005).

Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal yaitu antar daerah, dan mengurangi kesenjangan vertikal antara Pusat dan Daerah. Mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim, 2006). Oleh karena itu penerapan otonomi daerah/desentralisasi yang telah digariskan dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya dana perimbangan berupa transfer dana DAU, daerah diprediksi akan mampu membiayai pengeluaran kebutuhan daerah dan meningkatkan produktifitas sektor ekonomi yang lebih efektif dan efisien sehingga pertumbuhan PDRB di daerah meningkat seperti yang dikemukakan Elmi (2000).

Tabel 1.3

Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2005-2008 (persen)

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
Kab. Cilacap	13,20	68,32	12,37	4,04
Kab. Banyumas	16,30	49,43	8,32	7,34
Kab. Purbalingga	19,12	45,76	27,16	-7,68
Kab. Banjarnegara	23,11	52,53	7,11	7,99
Kab. Kebumen	12,97	47,93	9,07	5,30
Kab. Purworejo	14,32	53,59	9,19	9,34
Kab. Wonosobo	12,34	47,44	8,33	9,75
Kab. Magelang	13,02	52,84	9,06	7,20
Kab. Boyolali	13,97	57,21	7,38	8,13
Kab. Klaten	12,94	56,96	9,24	7,27
Kab. Sukoharjo	12,57	54,64	9,31	8,31
Kab. Wonogiri	12,63	55,53	6,39	7,55
Kab. Karanganyar	11,08	48,16	8,95	10,24
Kab. Sragen	11,49	52,34	10,01	7,34
Kab. Grobogan	11,26	48,94	9,93	9,10
Kab. Blora	10,57	43,76	9,19	6,81
Kab. Rembang	11,76	59,26	5,57	10,10
Kab. Pati	10,83	51,10	9,85	7,77
Kab. Kudus	12,56	57,61	17,48	9,15
Kab. Jepara	9,34	45,58	14,40	9,63
Kab. Demak	8,99	45,44	7,30	10,26
Kab. Semarang	9,42	47,81	10,55	8,15
Kab. Temanggung	12,31	53,37	8,75	8,21
Kab. Kendal	10,15	42,71	10,86	8,19
Kab. Batang	12,65	49,64	8,76	10,73
Kab. Pekalongan	12,01	48,96	8,95	13,17
Kab. Pemasang	11,87	48,47	7,97	5,82
Kab. Tegal	11,23	48,04	7,81	10,18
Kab. Brebes	12,05	51,30	7,94	8,88
Kota. Magelang	13,20	72,02	9,19	8,74
Kota. Surakarta	11,57	53,29	12,03	12,39
Kota. Salatiga	10,21	49,40	14,66	6,01
Kota. Semarang	20,10	54,72	14,19	8,20
Kota. Pekalongan	16,78	58,42	12,52	11,93
Kota. Tegal	8,72	6,02	16,56	7,21

Sumber :Lampiran, Data diolah

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa saat pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2005-2008 penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan PDRB justru mengalami fluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya DAU yang tinggi, ketergantungan daerah terhadap DAU menjadi sangat tinggi dan kemandirian daerah menurun sehingga pertumbuhan PDRB yang diharapkan meningkat justru mengalami fluktuasi seperti yang ditunjukkan tabel 1.1.

Transfer DAU yang tinggi menyebabkan masih tinggi ketergantungan sebagian besar pemerintah daerah pada dana dari pusat. Dalam penelitian Susilo dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Ketergantungan keuangan ini antara lain dapat dilihat pada anggaran pemerintah daerah yang komponen sumbangan dan bantuan dari pusat sangat tinggi, melampaui pendapatan asli daerahnya (Hamid, 2005), bisa dilihat dari hasil yang ditunjukkan tabel 1.2.

Transfer DAU juga menyebabkan ketidakadilan yang dirasakan sebagian daerah (Hamid, 2005). Transfer DAU yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan setiap daerah. Daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar, dan sebaliknya (Adi dan Harianto, 2007). Ada daerah yang merasa diperlakukan tidak adil karena penerimaan DAU-nya lebih rendah daripada daerah tetangganya, yang menurut perkiraan pemerintah daerah tersebut, dengan membandingkan variable-variabel perhitungan yang ada, daerahnyalah yang lebih besar.

Sebagian daerah juga merasa sumber daya alamnya dieksploitasi untuk pemerataan padahal daerahnya sendiri masih tertinggal. Upaya mengalokasikan DAU agar semua pihak puas memang sulit dipenuhi (Hamid, 2005).

Komponen desentralisasi fiskal yang ketiga yaitu Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil adalah bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana Bagi Hasil merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil (Nurcholis, 2005).

Dalam pasal 11 UU No. 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (DBHSDA). Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari : Kehutanan; Pertambangan umum; Perikanan; Pertambangan minyak bumi; Pertambangan gas bumi; dan Pertambangan panas bumi.

Tabel 1.4  
 Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  
 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah  
 Tahun 2005-2008 (persen)

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
Kab. Cilacap	14,31	36,32	11,01	1,85
Kab. Banyumas	17,23	18,52	20,84	14,07
Kab. Purbalingga	12,65	14,67	-17,99	43,73
Kab. Banjarnegara	23,41	51,39	25,18	8,52
Kab. Kebumen	15,67	26,36	-1,63	22,83
Kab. Purworejo	14,89	29,81	16,28	19,11
Kab. Wonosobo	16,55	19,97	24,08	7,14
Kab. Magelang	10,84	19,63	24,28	15,42
Kab. Boyolali	15,62	17,16	19,59	7,74
Kab. Klaten	7,63	4,57	16,84	2,14
Kab. Sukoharjo	14,01	13,85	2,16	-6,99
Kab. Wonogiri	14,70	71,87	12,70	17,44
Kab. Karanganyar	8,75	3,90	31,62	7,56
Kab. Sragen	23,06	21,32	22,82	5,14
Kab. Grobogan	32,43	40,51	40,35	-3,94
Kab. Blora	22,52	33,81	3,62	34,09
Kab. Rembang	16,23	19,71	31,30	40,40
Kab. Pati	24,31	26,90	16,27	8,36
Kab. Kudus	24,67	31,31	31,66	2,68
Kab. Jepara	23,14	41,14	10,36	6,53
Kab. Demak	12,24	17,66	29,04	2,21
Kab. Semarang	15,42	18,60	10,24	19,20
Kab. Temanggung	11,62	14,03	27,34	4,80
Kab. Kendal	15,23	16,25	16,95	11,95
Kab. Batang	13,11	15,25	22,83	-14,32
Kab. Pekalongan	21,09	27,02	20,54	-10,61
Kab. Pemasang	19,87	26,16	23,34	10,78
Kab. Tegal	23,14	45,59	0,29	19,31
Kab. Brebes	22,10	37,62	12,69	-14,03
Kota. Magelang	7,61	5,67	30,12	-1,14
Kota. Surakarta	10,23	2,67	13,92	30,73
Kota. Salatiga	28,10	-4,85	25,92	13,48
Kota. Semarang	10,21	-16,90	-8,66	-21,58
Kota. Pekalongan	5,23	8,33	19,79	-3,77
Kota. Tegal	9,20	5,30	12,78	0,62

Sumber: Lampiran, Data diolah



Dari tabel 1.4 menunjukkan Dana Bagi Hasil yang diterima setiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah tahun 2005-2008 berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme bagi hasil berdasarkan kapasitas Sumber Daya Alam dan/atau pusat bisnis yang dimiliki daerah. Daerah yang kaya Sumber Daya Alam akan memperoleh bagi hasil SDA yang relatif lebih besar dan daerah yang menjadi pusat bisnis akan memperoleh bagi hasil pajak yang relatif lebih besar (Waluyo, 2007). Pengoptimalan perolehan Dana Bagi Hasil yang dianggap sebagai modal bagi kepentingan pembangunan daerah akan mempercepat pertumbuhan PDRB (Pujiati, 2008).

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka judul dalam penelitian ini yaitu **“Analisis Pengaruh Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005-2008. Dari data yang ada menunjukkan PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2005–2008 mengalami fluktuasi, hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari keputusan penerapan desentralisasi fiskal. Dengan adanya sumber-sumber penerimaan daerah yang berupa PAD, DAU, dan DBH yang merupakan komponen-komponen desentralisasi fiskal menurut putusan Menteri Keuangan No. 224 / PMK. 07 tahun 2008 diharapkan PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat meningkat.

Dengan adanya penerimaan tersebut bisa menambah akumulasi modal yang merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataannya hanya beberapa daerah saja yang mengalami pertumbuhan PDRB secara konsisten. Terkait hal tersebut maka pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan adalah bagaimana dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap PDRB di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 melalui Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi yang meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Yang juga merupakan komponen-komponen desentralisasi fiskal menurut Menteri Keuangan No. 224 / PMK.07 tahun 2008, sehingga perlu diteliti :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008.
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008.
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008
2. Untuk mengestimasi pengaruh komponen-komponen desentralisasi fiskal terhadap PDRB, yaitu :
  - Mengestimasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2005-2008.
  - Mengestimasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2005-2008.
  - Mengestimasi pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2005-2008.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar-dasar teori yang melandasi penelitian ini, bahasan hasil-hasil berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis

**Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi deskriptif tentang bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang menguraikan variabel penelitian, definis operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

**Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi gambaran secara singkat mengenai keadaan obyek penelitian, gambaran kondisi perekonomian serta diuraikan hasil analisis.

**Bab V : Penutup**

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian serta keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Landasan Teori**

Dalam landasan teori ini dijabarkan teori-teori yang mendukung serta membantu dalam memecahkan masalah penelitian.

###### **2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Tulus Tambunan (2006), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan *output agregat* (barang dan jasa) atau PDB yang terus menerus.

Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1992) adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan

suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Di sini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita.

Sedangkan menurut David Ricardo, Pertumbuhan ekonomi adalah proses tarik menarik antara dua kekuatan dinamis yaitu *The Law Diminishing Return* dan kemajuan teknologi, yang kemudian dimenangkan oleh *The Law Diminishing Return*, karena adanya keterbatasan faktor tanah (sumber daya alam) akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber daya alamnya. Apabila semua potensi sumber daya alam telah dieksploitir secara penuh maka perekonomian berhenti tumbuh.

Masyarakat mencapai posisi stasionernya dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tingkat output konstan
2. Jumlah penduduk konstan
3. Pendapatan atau kapita konstan
4. Tingkat upah pada tingkat upah alamiah (minimal)
5. Tingkat keuntungan pada tingkat yang minimal
6. Akumulasi modal berhenti (stok modal konstan)
7. Tingkat sewa tanah yang maksimal

Jadi kesimpulan dari teorinya David Richardo adalah dari manapun kita mulai, akhirnya mencapai posisi stasioner (Lincoln Arsyad, 2000). Menurut Todaro (2000)

terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah :

- a. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi capital.
- c. Kemajuan teknologi

#### **2.1.1.2 Model Pembangunan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan.

Joao Mariano Saldhana (1998) mengemukakan bahwa modal dasar teori pertumbuhan ekonomi masih bertolak belakang dari paradigma ekonomi neo-klasik yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh modal, tenaga kerja dan produktifitas total faktor produksi (*total factor productivity*). Bila fungsi produksi sebuah perekonomian berbentuk Cobb Douglas maka:  $Y = A K^{\alpha} L^{\alpha-1}$  .....(2.1)

Dimana Y adalah output, a adalah teknologi, K adalah modal fisik, L adalah tenaga kerja dan  $\alpha$  adalah proporsi input. Dalam keadaan kompetitif, proporsi ini sama dengan elastisitas output berkenaan dengan modal dan tenaga kerja.

Jadi persamaan diatas mengatakan bahwa perubahan output dipengaruhi oleh teknologi, modal dan tenaga kerja. Perkembangan teknologi ditentukan dari modal dan bersifat *labour augmenting technology* karena peningkatan output akibat perubahan teknologi menyerupai peningkatan output akibat perubahan tenaga kerja. Disamping itu perkembangan teknologi yang bersifat eksternal, persamaan tersebut juga mengandaikan bahwa tingkat tabungan juga bersifat eksogen.

Menurut Mankiw (2000), akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan modal ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar modal atau eksogen, tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berdasarkan teori pertumbuhan endogen, fungsi produksi sederhana dari teori ini adalah (Mankiw, 2000) :

$$Y = AK \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana Y adalah output, A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal, sedangkan K adalah persediaan modal. Fungsi produksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori Neo Klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Model Neo Klasik menarik perhatian para ahli ekonomi regional, sebab model tersebut mengandung teori mengenai mobilitas dari teori pertumbuhan. Ada dua konsep pokok yang diberikan oleh teori pertumbuhan Neo Klasik, yaitu keseimbangan



dan mobilitas faktor produksi. Dalam menganalisa pertumbuhan daerah, ada hal penting yang harus diperbaiki yaitu mengenai analisa mobilitas faktor produksi, dimana mobilitas antar provinsi harus berlangsung secara leluasa antar daerah, terutama dalam arus perpindahan tenaga kerja dan modal.

### **2.1.1.3 Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia adalah strategi untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara. Desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi dan menjadi sebuah "makhluk organik" yang bergerak efisien mengatasi tantangan global. Dalam praktik, desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. Namun, dalam makna keduanya memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berlebihan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Menurut Rondinelli dan Cheema yang dikutip oleh Sarundajang ( 1999) bahwa Desentralisasi adalah *"the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations"*.

Hubungan desentralisasi dan otonomi, yaitu pada dasarnya otonomi adalah derivat dari desentralisasi daerah-daerah otonom, yaitu daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi, yang dimaksudkan dalam UU No. 32 tahun 2004 menyatakan penyerahan wewenang

Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah prinsip pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, baik bersifat kewilayahan maupun ke fungsian.

Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*).

Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Beberapa alasan mengapa desentralisasi perlu diterapkan menurut Joseph Riwo Kaho (1991) yang dikutip oleh Yudoyono (2003) dan didukung dengan pendapat Cheema dan Rondinelli yang dikutip oleh Romli (2007), yaitu :

6. Desentralisasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.

7. Desentralisasi sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri untuk mempergunakan hak-hak demokrasi.
8. Desentralisasi untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.
9. Desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah (seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya) serta,
10. Desentralisasi juga untuk membantu pembangunan.

Hampir sama dengan pendapat diatas, Simanjuntak (2001) berpendapat ada empat alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi yaitu:

1. Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga Negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah atau wilayah.
2. Tidak dapat dipraktikkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh Negara, terutama pada Negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia.
3. Pengetahuan lokal (*local knowledge*), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll.

4. Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat di fasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

Secara umum konsep desentralisasi pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi (Sidik, 2002), yaitu:

- 1) Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik.
- 2) Desentralisasi administratisi (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu.
- 3) Desentralisasi fiskal (*fiscal dezentralization*) yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup:
  - a. *Self-financing* atau *cost recorvery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah.
  - b. *Cofinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja.

- c. Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat, serta pinjaman daerah (sumber daya alam)
- 4) Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Sasana, 2009).

Menurut Menteri Keuangan No. 224 / PMK.07 tahun 2008 komponen-komponen desentralisasi fiskal terdiri dari : PAD, DAU, DBH.

#### **2.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Widjaja, 1992).

Menurut Nurcholis (2005) PAD merupakan sumber keuangan daerah yang utama. Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan PAD

lainnya yang sah. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (Juwaini, 2007).

Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Brata (2004) yang dikutip oleh Adi dan Harianto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2006) bahwa pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Namun apabila eksploitasi PAD dilakukan secara berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).

#### **2.1.1.5 Dana Alokasi Umum**

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan salah satu transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat (Hamid, 2005).

Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal yaitu antar daerah, dan mengurangi kesenjangan vertikal antar pusat dan daerah. Mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas

perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim, 2006). Oleh karena itu penerapan otonomi daerah/desentralisasi yang telah digariskan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu fungsi DAU adalah untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada, sehingga distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar (Adi dan Harianto, 2007). Ada daerah yang merasa diperlakukan tidak adil karena penerimaan DAU-nya lebih rendah daripada daerah tetangganya, yang menurut perkiraan pemerintah daerah tersebut, dengan membandingkan variabel-variabel perhitungan yang ada, daerahnyalah yang lebih besar. Ketentuan yang di tetapkan menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian daerah yang merasa sumber daya alamnya dieksploitasi untuk pemerataan padahal daerahnya sendiri masih tertinggal. Upaya mengalokasikan DAU agar semua pihak puas memang sulit dipenuhi (Hamid, 2005). Formulasi DAU yang ditransfer dari pusat ke daerah menurut Hamid (2005) yaitu :

$$DAU = FN - FC \quad \dots\dots\dots (2.3)$$

di mana :

DAU = Dana Alokasi Umum yang diterima daerah

FN = kebutuhan fiskal daerah

FC = kapasitas fiskal daerah

Transfer dana yang tinggi dari pusat berupa DAU menyebabkan masih tinggi ketergantungan sebagian besar pemerintah daerah pada dana dari pusat untuk belanja

daerah. Dalam penelitian Susilo dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Ketergantungan keuangan ini antara lain dapat dilihat pada anggaran pemerintah daerah yang komponen sumbangan dan bantuan dari pusat sangat tinggi, melampaui Pendapatan Asli Daerah (Hamid, 2005). Tingginya DAU yang diperoleh pemerintah daerah menyebabkan kurangnya kreatifitas dan inisiatif daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.1.6 Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil adalah bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana Bagi Hasil merupakan alokasi yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil (Nurcholis, 2005).

#### **2.1.1.7 Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan teori *Tiebout Model* yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan, sekaligus dari sisi penganggaran publik akan muncul konsep efisiensi karena tepat guna dan berdaya guna.



Desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah Kabupaten/Kota akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial yang merespon perbedaan-perbedaan regional dan lokal mungkin akan lebih efektif dalam mempertinggi pembangunan ekonomi daripada kebijakan-kebijakan sentralisasi yang bisa jadi mengabaikan perbedaan-perbedaan antar daerah tersebut. Hal ini dapat dibenarkan sebab pemerintah Kabupaten/Kota mengetahui daerahnya lebih baik daripada yang diketahui oleh pemerintah pusat (Sumarsono dan Utomo, 2009).

Bank Dunia (1997) mengemukakan hubungan yang mungkin terjadi antara Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yaitu, desentralisasi akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal mempunyai dampak meningkatkan instabilisasi makro ekonomi sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta, desentralisasi fiskal untuk suatu daerah bisa berdampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tergantung kesiapan kelembagaan daerah tersebut dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal (Sumarsono dan Utomo, 2009).

### **2.1.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi maupun ketimpangan antar wilayah telah banyak dilakukan oleh peneliti. Beberapa diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Amin Pujiati (2008) yang melakukan penelitian pada Karesidenan Semarang dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal”. Variabel independen yang digunakan yaitu PAD, DAU, DBH dan tenaga kerja (TK), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi yang di proksi dengan PDRB. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi dengan model data panel menggunakan metode *Generalized Least Squares (GLS)* dengan pendekatan *fixed effect*. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja (TK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Joko Waluyo (2007) yang melakukan penelitian pada antar daerah di Indonesia dengan judul “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia”. Variabel independen yang digunakan yaitu DAU, DBH (DBHP dan DBHSDA) dan desentralisasi fiskal, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Alat analisis yang digunakan yaitu *Two Stage Least Square (TSLS)*. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi sebagai pemerataan fiskal daerah juga merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan DAU sangat efektif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) menghasilkan rata-rata

pertumbuhan ekonomi yang negatif dan memperburuk kesenjangan pendapatan antar daerah.

3. Hadi Sasana (2005) yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul “Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan antar wilayah, antar sektor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Variabel independen yang digunakan yaitu PAD, DAU, DBH dan tenaga kerja (TK), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi yang di proksi dengan PDRB atas dasar harga konstan. Alat analisis yang digunakan yaitu *Pooled Least Square (PLS)* memakai intersep *fixed effects*. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hanya di Kabupaten Sleman (nilai Koefisien 0,213864) dan Kota Yogyakarta (nilai Koefisien 0,301794). Sedangkan pada Kabupaten bantul dan Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo mempunyai hubungan yang positif dan tetapi secara statistik tidak signifikan. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman (Koefisien -0,109540), Kota Yogyakarta (Koefisien -0,52567), Kabupaten Gunung Kidul (Koefisien -0,039490), dan Kabupaten Bantul (Koefisien -0,08204). Hubungan negatif tetapi tidak signifikan terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan di masing-masing Kabupaten. Kabupaten Kulon Progo (Koefisien 0,573452), Kabupaten Gunung Kidul (Koefisien 0,288920), dan kota Yogyakarta (Koefisien 0,019030). Tenaga kerja (TK) berpengaruh positif dan signifikan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Zhang dan Zhou (1998) yang melakukan penelitian di Cina dengan judul “Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth in China”. Variabel independen yang digunakan yaitu tenaga kerja, inflasi, keterbukaan dan investasi, sedangkan variabel dependennya yaitu tingkat pertumbuhan GDP riil. Alat analisis yang digunakan yaitu *Least Squares Dummy Variables* (LSDV). Hasil penelitian diperoleh bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 0,05.

Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Kesimpulan
Amin Pujiati (2008)	Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal	PDRB, PAD, DBH, DAU, Tenaga Kerja	<i>Generalized Least Squares</i> (GLS), dengan pendekatan <i>fixed effect</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan semarang</li> <li>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan semarang</li> <li>3. Peranan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan semarang</li> <li>4. Peranan Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan semarang</li> </ol>

				5. Ketimpangan regional maupun sektoral semakin meningkat setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal.
Joko Waluyo (2007)	Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan AntarDaerah di Indonesia	Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonom	<i>Two Stage Least Square (TSLS)</i>	Hasil yang didapat menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam.
Hadi Sasana (2005)	Analisis Dampak pelaksanaan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan antar wilayah, antar sektor di Kab/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	PAD, DBH, DAU, Tenaga Kerja (TK)	<i>Pooled Least Square (PLS)</i> memakai intersep <i>fixed effect</i>	PAD mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hanya di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. DAU berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Peranan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Peranan Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketimpangan regional maupun sektoral semakin meningkat setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal.
Zhang dan Zhou (1998)	Fiscal Decentralization. Public Spending	Tenaga Kerja, Inflsi, keterbukaan	<i>Least Squares Dummy Variables (LSDV)</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif

	and Economic Growth in China	dan investasi		dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar – 0,05
--	------------------------------------	---------------	--	--

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka pemikiran akan menghubungkan variabel-variabel penelitian, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dimodifikasi dengan mengacu pada putusan Menteri Keuangan No. 224 / PMK.07 tahun 2008. Variabel yang digunakan yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Y.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini bisa terjadi karena dengan penerimaan PAD yang semakin tinggi, daerah semakin bisa memenuhi kebutuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik sehingga produktifitas masyarakat dan investor meningkat yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

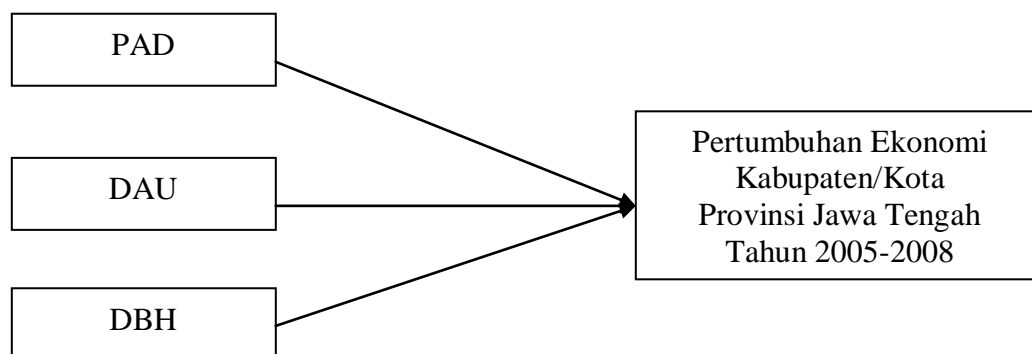
Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Dengan adanya Dana Alokasi Umum, pembiayaan daerah dalam

pembangunan lebih terjamin. Namun Dana Alokasi Umum menyebabkan masih tinggi ketergantungan sebagian besar pemerintah daerah pada dana dari pusat untuk belanja daerah. Dalam penelitian Susilo dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi.

Dana Bagi Hasil merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pusat yang merupakan dana perimbangan. Dana Bagi Hasil merupakan penjumlahan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Pemerintah daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah semakin besar. Hal ini bisa terjadi karena Dana Bagi Hasil dijadikan sebagai pembiayaan dalam pembangunan.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum serta satu variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Adapun yang menjadi Kerangka Pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1  
Kerangka pemikiran



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan menggunakan perhitungan empirik dan nilai matematis, dimana hipotesis ini terjadi pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 saat pelaksanaan desentralisasi fiskal.
2. Diduga realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 saat pelaksanaan desentralisasi fiskal.
3. Diduga realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 saat pelaksanaan desentralisasi fiskal.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman penelitian, perlu penegasan tentang variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, dan DBH.

##### **3.1.2 Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman tentang variabel yang diteliti, perlu penegasan dan penjelasan mengenai definisi operasional variabel. Definisi operasional memberikan pengertian variabel yang disesifikasikan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pengukuran. Dilihat dari sudut pandang hubungannya variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (Umar, 2003). Variabel dapat di tulis dalam X. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini menspesifikasikan variabel independen dan definisi operasional sebagai berikut :

1. "X<sub>1</sub>" (Pendapatan Asli Daerah).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008.

2. “X<sub>2</sub>” (Dana Alokasi Umum).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi DAU Kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008. Data diperoleh dari Biro Keuangan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

3. “X<sub>3</sub>” (Dana Bagi Hasil).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi ketimpangan vertikal yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi DBH Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008.

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang mendasari penelitian, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dapat di tulis dalam Y. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penelitian ini menspesifikasikan variabel dependen dan definisi operasional sebagai “Y” (PDRB). Data

yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel (*pooling data*). Data panel merupakan gabungan *dari time series* dan *cross section* (Kuncoro, 2007). Data *time series* berupa tahun 2005-2008, data *cross section* berupa 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data panel mempunyai beberapa keunggulan antara lain sebagai berikut (Gujarati, 2009) :

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini, selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun perilaku yang lebih kompleks.
2. Penggabungan data *time series* dan *cross-section* akan menghasilkan data yang lebih informatif, bervariasi, mengurangi keterkaitan antar variabel dan mempunyai derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang lebih besar serta lebih efisien.
3. Dengan mempelajari observasi *cross-section* secara berulang-ulang (*time series*), data lebih cocok mempelajari perubahan yang dinamik.

4. Data panel dapat menjelaskan dan mendeteksi pengaruh-pengaruh yang tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan data *time series* dan *cross-section*.
5. Data panel dapat meminimalisasi bias.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini di peroleh dari beberapa sumber, antara lain :

1. Data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 bersumber dari kantor BPS Provinsi Jawa Tengah.
2. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 bersumber dari Biro Keuangan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Data Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 bersumber dari Biro Keuangan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Data Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 bersumber dari Biro Keuangan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka dan tehnik dokumentasi. Studi pustaka merupakan tehnik analisa untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literature, dan lain-lain yang masih relevan, dan tehnik dokumentasi

dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek studi

### **3.4 Metode Analisis Data**

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan dapat dispesifikasikan sebagai berikut :

1. Analisis deskriptif kualitatif akan digunakan untuk mencapai tujuan pertama yaitu analisis pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008. Secara deskriptif akan dilihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008 melalui data yang telah dikumpulkan.
2. Analisis kuantitatif akan menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel dan sebagainya)(Umar, 2003). Analisis kuantitatif digunakan untuk mencapai tujuan yang kedua yaitu mengestimasi pengaruh komponen-komponen desentralisasi fiskal (PAD, DAU, DBH) terhadap PDRB.

Untuk mengestimasi pengaruh PAD, DAU dan DBH terhadap PDRB digunakan alat analisis regresi berganda dengan model data panel. Berkaitan dengan penggunaan data panel dalam penelitian ini, ada tiga teknik analisis yang dapat digunakan, yaitu (Gujarati, 2009) :

1. Metode OLS atau dikenal juga sebagai metode *common effect* atau koefisien tetap antar waktu dan individu. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk

mengestimasi data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperlihatkan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam berbagai kurun waktu.

2. Metode *fixed effect* atau slope konstan akan tetapi intersep berbeda antara individu, menempatkan bahwa *eit* merupakan kelompok spesifik atau berbeda dalam constant term pada model regresi. Bentuk model tersebut biasanya disebut model *least squares dummy variable* (LSDV). Pengertian *fixed effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara daerah, namun intersepnya sama antar waktu (*time invariant*). Disamping itu, model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar individu dan antar waktu.
3. Metode *random effect* menetapkan *eit* sebagai gangguan spesifik kelompok identik dengan *eit*, kecuali terhadap masing-masing kelompok. Namun gambaran tunggal yang memasukan regresi identik untuk setiap periode. Model ini lebih dikenal sebagai model *generalized least squares* (GLS).

Tahapan analisis kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari : spesifikasi model dengan menggunakan data panel, analisis dengan data panel, uji asumsi klasik dan uji statistik.

### 3.4.1 Spesifikasi Model

Untuk mengestimasi pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap PDRB digunakan alat analisis regresi linier berganda. Adapun model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Mankiw, 2003) :

$$Y = A K \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana:

Y = Tingkat output

K = Persediaan modal

A = Konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal

Berdasarkan persamaan (3.1) dapat diketahui bahwa modal mempengaruhi tingkat output. Asumsi yang diberikan pada persamaan (3.1) adalah *constant return to scale*, maka Y diasumsikan sebagai PDRB, K diasumsikan sebagai PAD, DAU dan DBH, sehingga persamaan (3.1) dapat diturunkan sebagai berikut :

$$Y = f(\text{PAD}, \text{DAU}, \text{DBH}) \quad \dots\dots\dots (3.2)$$

Dari persamaan (3.1) dan (3.2), maka diperoleh,

$$Y = A \alpha_1 \text{PAD} \alpha_2 \text{DAU} \alpha_3 \text{DBH} \quad \dots\dots\dots (3.3)$$

Mengacu pada penelitian terdahulu (Pujiati, 2008 dan Sasana, 2005), untuk menggunakan persamaan (3.3) diturunkan dengan menggunakan log, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{LY} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LX}_1 \text{it} + \alpha_2 \text{LX}_2 \text{it} + \alpha_3 \text{LX}_3 \text{it} + e_{it} \quad \dots\dots\dots (3.4)$$

Keterangan:

LY = PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000

LX<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

LX<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum (DAU)

LX<sub>3</sub> = Dana Bagi Hasil (DBH)

- $\alpha_0$  = Konstanta  
 $i$  = 1, 2, 3, ..., 35  
 $t$  = 2005, 2006, 2007, 2008  
 $e_{it}$  = Komponen error dalam model penelitian  
 $\alpha_1-\alpha_3$  = Koefisien parameter

### 3.4.2 Pengujian Model

Untuk memilih model yang tepat, perlu dilakukan beberapa pengujian model, yaitu :  
*pertama* menggunakan Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji F), yaitu untuk mengetahui apakah tehnik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy atau OLS. Adapun uji F statistiknya, sebagai berikut;

$$F = \frac{(RRSS - URSS) / (m)}{RSS2 / (nt - n - k)} \dots\dots\dots (3.5)$$

Dimana:

RRSS : *Restricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode OLS / *common effect*).

URSS : *Unrestricted Residual Sum Square* (merupakan *Sum of Square Residual* yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode *fixed effect*).

Hipotesis nolnya adalah bahwa intersep adalah sama. Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (df) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak  $nt - n - k$  untuk denominator. M merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy.



Kedua, Uji Lagrange Multiplier (LM), yang digunakan untuk mengetahui model *random effect* lebih baik dari model OLS. *The Breusch – Pagan LM Test* digunakan sebagai pertimbangan statistik dalam memilih model *random effect* atau OLS.

Ho : OLS

H1 : *Random Effect*

Dasar penolakan terhadap Ho dengan menggunakan statistik LM yang mengikuti distribusi dari *Chi Square*.

Ketiga, Uji Hausman, yang bertujuan untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect* yang paling baik untuk digunakan. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa LSDV di dalam metode *fixed effect* dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu uji hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Hasil metode Hausman adalah bahwa perbedaan kovarian dari estimator yang efisien dengan estimator yang tidak efisien adalah nol, selanjutnya mengikuti kriteria Wald, uji Hausman ini akan mengikuti distribusi chi-squares. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

Dilihat dari hasil pengujian, apabila hasil yang diperoleh menggunakan tehnik analisis *fixed Effect model*, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersepnya bervariasi antar individu maka dalam model *fixed effect* harus memasukan variabel buatan (variabel *dummy*). Hal ini untuk menyatakan perbedaan intersep. Adanya variabel *dummy* maka kita telah menambahkan sebanyak (N-1) variabel boneka (d) ke dalam model dan menghilangkan satu sisanya untuk menghindari kolinearitas sempurna antar variabel penjelas. Dengan menggunakan pendekatan ini akan terjadi *degree of freedom*  $NT - N - K$ .

Ketika variabel *dummy* digunakan untuk mengestimasi *fixed effect*, maka persamaan itu disebut dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Penggunaan *dummy* pada penelitian ini yaitu menggunakan *dummy* wilayah. Penggunaan *dummy* wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara daerah yang rata – rata pertumbuhannya paling tinggi selama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 dengan daerah lainnya. Diduga antara daerah yang memiliki rata - rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi dan daerah lainnya memiliki perbedaan karakteristik dan sumber daya alam yang berbeda.

Dalam penelitian ini, Kota Semarang dijadikan sebagai *benchmark* karena Kota Semarang sebagai daerah yang memiliki rata – rata pertumbuhan paling tinggi periode tahun 2005 – 2008 di Provinsi Jawa Tengah, selain itu Kota Semarang juga merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Setelah memasukkan variable *dummy* wilayah ke dalam persamaan (3.4), maka model persamaan adalah sebagai berikut:

$$LY = \alpha_0 + \alpha_1 LX_{1\ it} + \alpha_2 LX_{2\ it} + \alpha_3 LX_{3\ it} + \beta_1 D_1 + \beta_2 D_2 + \beta_3 D_3 + \dots + \beta_{35} D_{35} + e_{it} \quad (3.6)$$

Keterangan :

LY	=	PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000
LX <sub>1</sub>	=	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
LX <sub>2</sub>	=	Dana Alokasi Umum (DAU)
LX <sub>3</sub>	=	Dana Bagi Hasil (DBH)
A/ $\alpha_0$	=	Konstanta
i	=	1, 2, 3,..., 35 (Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)
t	=	2005, 2006, 2007, 2008 (Tahun penelitian)
e <sub>it</sub>	=	Komponen error dalam model penelitian
$\alpha_1$ - $\alpha_3$	=	Koefisien parameter
D <sub>1</sub> , D <sub>2</sub> , D <sub>3</sub> ...D <sub>35</sub>	=	variabel <i>Dummy</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_{35}$	=	koefisien <i>Dummy</i>

### 3.5 Uji Asumsi Klasik

Selain beberapa pengujian yang dilakukan pada model empiris, dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan beberapa uji asumsi klasik, seperti uji Multikolinearitas, uji Autokorelasi, uji Heteroskedastisitas dan uji Normalitas.

#### 3.5.1 Uji Multikoleniaritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Penelitian ini akan menggunakan *auxilliary regressions* dan *Klien's rule of thum* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas.

Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih besar dari  $R^2$  regresi *auxilliary* maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

### 3.5.2 Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2005) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan-kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka ada indikasi masalah autokorelasi. Masalah ini muncul karena residu (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada jenis data *times series*.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji *Breusch-Godfrey* (BG Test) (Gujarati, 2009). Pengujian ini dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu  $u_i$  dengan menggunakan model *autoregressive* dengan orde  $p$  sebagai berikut:

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \epsilon_t \quad \dots\dots\dots (3.7)$$

Dengan  $H_0$  adalah  $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$ , dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol, menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual apabila  $\chi^2$  tabel lebih besar dibandingkan dengan nilai  $Obs \cdot R\text{-squared}$ , maka model tersebut bebas dari autokorelasi.

### 3.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Gujarati (2009) asumsi penting model regresi linear klasik (CLRM) adalah bahwa gangguan  $e_{it}$  yang tercakup dalam fungsi regresi populasi (PRF) bersifat homoskedastis, artinya semua memiliki varians yang sama,  $\sigma^2$ . Jika tidak demikian, dimana  $u_i$  adalah  $\sigma_i^2$  yang menunjukkan bervariasi dari observasi ke observasi berarti kita menganggap situasi heteroskedastisitas atau varians tak sama. Banyak cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model, salah satunya adalah dengan menggunakan Uji *White* (*White Test*).

Pedoman dari penggunaan model *White* adalah menolak hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Obs\*R-squared* Uji *White* dengan nilai  $\chi^2$  (*chi-square*) tabel. Nilai *Obs\*R-squared* yang lebih kecil dibandingkan nilai  $\chi^2$  (*chi-square*) tabel, menunjukkan bahwa model estimasi regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

### 3.5.4 Uji Normalitas

Pengujian distribusi data bertujuan untuk pengujian suatu data penelitian apakah dalam model statistik, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Distribusi data normal menggunakan statistik parametrik sebagai alat pengujian. Sedangkan distribusi tidak normal menggunakan statistik non parametrik sebagai alat pengujian. Untuk mengetahui distribusi data suatu penelitian, salah satu alat

yang digunakan adalah menggunakan uji Jarque-Bera (J-B test), yang diperoleh dengan bantuan software Eviews 6 (Winarno, 2009). Apabila nilai J-B lebih kecil dari 2 maka model dapat dikatakan terdistribusi normal, dan jika probabilitas lebih besar dari 5% model dikatakan terdistribusi normal.

### 3.6 Uji Statistik

Selain Uji Asumsi Klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Pengujian statistik melibatkan ukuran kesesuaian model yang digunakan (*goodness of fit*) dan uji signifikansi, baik pengujian secara parsial (uji t) maupun pengujian secara simultan (uji F). Secara spesifik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 3.6.1 Koefisien Determinasi

Nilai  $R^2$  disebut juga koefisien determinasi. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya (*goodness of fit test*). Nilai  $R^2$  dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum y_1 x_1 + \beta_2 \sum y_2 x_2 + \dots + \beta_n \sum y_n x_n}{\sum y_n^2} \dots\dots\dots (3.8)$$

Nilai  $R^2$  berkisar antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai  $R^2$  mendekati satu berarti variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Gujarati, 2009).

### 3.6.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$ , berarti tidak ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

$H_0 : \beta > 0$ , berarti ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a. Jika t hitung  $>$  t tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).
- b. Jika t hitung  $<$  t tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

### 3.6.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$ , berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

$H_0 : \beta > 0$ , berarti ada hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- c. Jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak berarti ada variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Jika  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.